

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilewati semua kalangan, baik muda ataupun tua harus terdidik. Apalagi banyak tuntutan yang berkaitan dengan pendidikan dan harus dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan program Jokowi – JK yang tertuang dalam nawacita menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendidikan dengan mengusung jargon Indonesia Pintar dan wajib belajar selama 12 tahun serta bebas biaya. Namun, disisi lain presiden belum mampu menerapkan program nawacita yang lain yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Revolusi karakter bangsa melalui pergantian kurikulum yang awalnya menggunakan kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 atau sering disebut K13 (Kurtilas).

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memperbaiki kualitas pendidikan di semua wilayah Indonesia yaitu sistem zonasi sekolah yang ditunjukkan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMA, dan SMK. Sistem zonasi sendiri merupakan zona wilayah yang ditentukan oleh pemerintah yang dilihat dari zona atau jarak dari rumah ke sekolah. Biasanya radius jarak ini ditentukan oleh masing-masing daerah dengan diikuti kriteria masing-masing yang telah ditentukan. Program ini

diberlakukan karena mengacu pada Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Program ini diterapkan guna pemeratakan kualitas pendidikan setiap daerah atau masing-masing daerah di Indonesia. Walaupun di sebagian besar sekolah di Indonesia sudah menerapkan sistem zonasi ini, tentu banyak pro dan kontra yang muncul. Dapat dikatakan lebih dominan masyarakat yang kontra daripada masyarakat yang pro dari adanya program zonasi ini. Dilansir dari laman media online (Apinino, Empat Kelemahan Sistem Zonasi dalam PPDB 2018, 2018) yang menyebutkan bahwa program zonasi sekolah memiliki beberapa kelemahan diantaranya banyak muncul SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu (tidak sesuai fakta yang ada). Hal ini terjadi karena kewajiban setiap sekolah harus menerima calon peserta didik baru sebanyak 20% dengan lampiran SKTM dari daya tampung yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga banyak orang tua yang melampirkan SKTM palsu untuk pendaftaran sekolah anaknya. Hal tersebut dilakukan karena orang tua takut jika anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan akibat diterapkannya sistem zonasi ini.

Aturan wajib menerima 90% siswa dari zona terdekat dari sekolah, jika di analogikan dengan sekolah yang jauh dari pemukiman warga maka konsekuensinya yaitu sekolah akan sepi peminat karena tidak ada

konsentrasi masyarakat di wilayah itu. Sebaliknya jika sekolah terdapat di pemukiman padat penduduk, bisa jadi sekolah tersebut akan kelebihan peminat. Tentunya ini tidak adil bagi antara satu sekolah dengan sekolah lain, itupun baru dilihat dari jarak rumah ke sekolah belum yang lain-lain. PPBD dengan sistem zonasi juga menyebabkan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba. Hal ini dilakukan agar kemungkinan peluang diterima di sekolah tersebut semakin besar, karena kuota yang ditentukan dalam Permendikbud hanya dalam hitungan satuan persen saja yaitu 5%.

Orang tua siswa yang kontra akan peraturan ini menyebutkan bahwa hal tersebut tidak adil bagi semua kalangan siswa yang nantinya akan mendaftar di sekolah tertentu. Dalam suatu kasus, ada siswa A yang mempunyai nilai tinggi namun tidak diterima, sedangkan siswa B yang memiliki nilai lebih rendah daripada siswa A tadi malah diterima di sekolah tersebut. Lagi-lagi adanya sistem zonasi alasannya. (Simatupang, 2018)

Sistem zonasi diterapkan untuk menghapuskan sekolah yang sudah memiliki semacam “sekolah favorit”. Tujuan lain juga untuk pemeratakan kualitas pendidikan, dimana tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah yang dipelosok atau jauh dari pemukiman warga maupun sekolah di pusat kota. Muhadjir Effendi (Awaliyah, 2018) selaku Menteri Pendidikan berpendapat bahwa beliau mempunyai keyakinan bahwa dari penerapan sistem zonasi ini akan menjadi cara untuk membenahi pendidikan di negeri ini. Reaksi pro kontra dari masyarakat muncul karena adanya ketakutan atau kekhawatiran terhadap sekolah yang tidak siap menerapkan sistem

zonasi. Apalagi untuk sekolah yang berada didaerah pinggiran atau tertinggal di Indonesia. Meskipun banyak hal negatif dalam penerapannya, program ini tetap memiliki hal positif misalnya saja mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk mengikuti pendidikan yang layak kedepannya. nasional. (Riany, 2018)

Hambatan yang dihadapi pemerintah juga banyak ketika para pembuat kebijakan ini menerapkan sistem zonasi. Apalagi untuk para orang tua yang protes karena kebanyakan dari mereka menginginkan anak mereka bersekolah di sekolah favorit. Para orang tua juga masih berada pada paradigma bahwa nilai hasil Ujian Nasional yang tinggi dapat masuk ke sekolah favorit nantinya. Keberhasilan dari sistem zonasi menjadi PR tersendiri bagi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Penerapan program zonasi di Kabupaten Wonogiri berbasis rumah tangga. Sehingga siswa yang berada di wilayah zonasi rumah tangga wajib diterima di sekolah yang satu wilayah RT dengan rumah siswa tersebut. Sistem zonasi berbasis Rumah Tangga ini tidak menentukan berapa jumlah siswa yang harus diterima (kuota). Peraturan nasional menjelaskan bahwa harus mempertimbangkan nilai pada poin setelah zonasi sedangkan di Kabupaten Wonogiri memang sedikit berbeda karena sekolah wajib menerima siswa dengan tidak mempertimbangkan nilai dari siswa yang bersangkutan. Sedikit perbedaan tersebut dikarenakan faktor wilayah (berada di daerah pelosok) serta sebagian wilayah di Kabupaten Wonogiri

belum siap untuk menerapkan sistem zonasi ini. Berikut penulis sajikan data SMA (Sekolah Menengah Atas) yang sudah menerapkan sistem zonasi di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 1.1

SMA di Kabupaten Wonogiri yang Sudah Menerapkan Program Zonasi

Nama Sekolah	Daerah Cakupan Zonasi I	Zonasi II
SMA N 1 Wonogiri	Kecamatan Wonogiri Kota, Selogiri, Ngadirojo, Wuryantoro, Manyaran, Nguter Sukoharjo, dan Jatipuro Karanganyar.	Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di lingkup zona I.
SMA N 2 Wonogiri	Kecamatan Wonogiri Kota, Selogiri, Ngadirojo, Manyaran, Jatipuro, Nguter.	Kecamatan di luar Zona I dan berada di lingkup Kabupaten Wonogiri
SMA Negeri 3 Wonogiri	Wonogiri Kota, Selogiri, Ngadirojo, Wuryantoro, Manyaran, Jatipuro, Nguter	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Girimarto	Kecamatan Girimarto, Ngadirojo, Jatipurno, Sidoharjo, Jatisrono, Jatipuro	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Sidoharjo	Sidoharjo, Jatiroto, Ngadirojo, Jatisrono, Girimarto	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Jatisrono	Jatisrono, Jatiroto, Jatipurno, Sidoharjo, Girimarto, Slogohimo	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Slogohimo	Slogohimo, Bulukerto, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Jatisrono, Jatipurno	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Purwantoro	Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Kismantoro, Slogohimo, Badegan	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri

		yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Nguntoronadi	Nguntoronadi, Ngadirojo, Tirtomoyo, Batuwarno, Baturetno	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Wuryantoro	Wuryantoro, Eromoko, Manyaran, Wonogiri Kota	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Manyaran	Manyaran, Eromoko, Wuryantoro, Selogiri, Wonogiri Kota, Semin, Bulu, Weru	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Pracimantoro	Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Giritontro, Paranggupito, Ponjong, Rongkop	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.
SMA Negeri 1 Baturetno	Baturetno, Batuwarno, Giriwoyo, Nguntoronadi, Karangtengah, Punung, Donorojo	Semua wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk di zona I.

Sumber : (Dindikbud, 2018)

Berdasarkan tabel di atas penerapan program zonasi baru dilaksanakan 2 SMA di atas. Penerapan di dua SMA tersebut masih menjadi sekolah favorit dikalangan masyarakat umum. Seperti tabel di atas, SMA N 1 Wonogiri yang berlokasi di daerah kota yaitu Sanggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri sehingga cakupan zonasinya juga didaerah kota misalnya saja sampai di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan SMA N 2 Wonogiri yang berlokasi di daerah pinggiran kota yaitu di Wonokarto Tengah, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri sehingga cakupannya lebih pelosok misalnya saja Kecamatan Manyaran. Cakupan zonasi kedua sendiri juga memiliki tempat yang sama yaitu berada diluar zona 1 dan masih berada di lingkup Kabupaten Wonogiri misalnya

Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Eromoko, dan lain-lain.

Penelitian ini mengambil objek di SMA N 1 Wonogiri dan SMA N 2 Wonogiri. Hal tersebut dikarena dua sekolah merupakan tolak ukur bagi sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kedua sekolah ini juga dianggap sekolah unggulan atau sekolah favorit di Kabupaten Wonogiri karena lokasinya yang berada ditengah kota dan padat penduduk. Fakta lain yaitu sistem atau program zonasi baru diterapkan di kedua sekolah ini. Terdapat perbedaan kualitas juga antara kedua sekolah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Program Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri jenjang SMA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program zonasi sekolah mampu untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi program zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program zonasi sekolah ini mampu pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program zonasi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari adanya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi dalam konteks analisis pelaksanaan sistem zonasi sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan.

2. Manfaat Praktis

1. Menambah dan memperluas pengetahuan bagi penulis serta dapat mempraktekkan teori yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung.
2. Menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan dengan dinas terkait serta memahami lebih jauh mengenai analisis pelaksanaan program zonasi sekolah ini untuk pemerataan kualitas pendidikan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penerapan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPBD masih banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. masyarakat menilai bahwa sistem zonasi masih sangat sulit diterapkan di Indonesia, bahkan banyak para orang tua yang menggelar aksi demo di lingkungan sekolah terkait penerimaan peserta didik baru berdasarkan

jarak bukan nilai. Namun, pemerintah sendiri beranggapan dengan sistem zonasi pemerataan kualitas pendidikan dapat dengan cepat diterapkan. Pemerintah juga berharap setelah diterapkannya sistem zonasi ini dapat menghilangkan cap “sekolah favorit”. (Wahyuni, 2018)

Pelaksanaannya pendidikan karakter dapat dilakukan dengan integrasi kedalam mata pelajaran yang ada dapat pula dilakukan dengan 5 cara diantaranya penentuan prioritas, bagaimana menerapkan keteladanan, mudah, disiplin, dan kesadaran atau refleksi. Peran sekolah juga penting dalam pembentukan karakter siswa SMP Negeri 15 Kedung Cowek, hal tersebut dilakukan dengan memasukkan materi keagamaan dalam proses dan pembelajarannya. (Abidin & Asrori, 2018)

Pelaksanaan sistem zonasi menciptakan banyak kendala atau permasalahan diantaranya belum ada sosialisasi dengan masyarakat, kapasitas sekolah yang masih belum maksimal serta belum mencukupi. Penerapan sistem zonasi ditakutkan akan menjadi boomerang bagi sekolah itu sendiri karena biasanya akan terjadi pengelompokkan siswa berdasarkan prestasi. Sehingga, sistem zonasi perlu dikaji ulang oleh pemerintah agar tidak merugikan banyak pihak terutama siswa yang berprestasi. (Andina, 2017)

Portal web komunitas guru online sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak hal positif yang diperoleh setelah adanya sistem ini. Guru dapat bertukar informasi dengan guru yang lain, dapat pula menjadi media belajar ketika didalam kelas. Portal ini juga bermanfaat untuk membrikan kemudahan bagi para guru sebagai ajang memperkenalkan karya

ilmiah mereka. Selain itu, karya ilmiah tersebut dapat dipublikasikan dan masyarakat luas turut membaca karya tersebut. Adanya portal komunitas guru online ini menghindarkan mereka dari kejahatan ilmiah seperti plagiasi dll. (Candiasa, Mertasari, Setemen, & Sunu, 2013). Pemenuhan hak-hak serta kewajiban anak bangsa atas pendidikan dan harus meratanya kualitas pendidikan itu sendiri. Pemerintah juga memberi kewenangan lewat peraturan perundang-undangan agar masyarakat memperoleh pendidikan secara layak. (Mujahidun, 2016)

Negara wajib menerapkan dan memfasilitasi pendidikan dasar. Pemerintah juga harus mengupayakan beberapa usaha untuk pendidikan yang penuh bagi warga negara. Sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Makassar sudah dijalankan dengan baik. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya di Kota ini masih belum sepenuhnya diterapkan karena dalam faktanya beberapa sekolah negeri meminta berbagai pungutan kepada siswanya. (Ismail, 2014)

Implementasi kebijakan PPDB ni menggunakan teori Van Metter dan Van Horn terdapat enam variabel didalamnya. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya (sumber daya manusia), sikap/kecenderungan (*disposition*), komunikasi antara organisasi dengan para pelaksana semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan untuk variabel kondisi sosial, ekonomi, politik menemui hambatan, hambatan tersebut khusus dari segi sosial dan politik. Hambatan dari segi sosial dilihat dari respon masyarakat menanggapi sistem atau program baru yang ada (zonasi) dalam PPDB tahun ini.

Dari hambatan segi politik yaitu masyarakat menilai pemerintah terlalu gegabah dalam mengimplementasikan kebijakan baru. (Lestari & Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., 2017). Pengaruh PPDB melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung dapat dikatakan sudah baik dan meningkat secara signifikan dan berpengaruh kuat terhadap penerimaan peserta didik baru tersebut. (Wulandari, Hasyim, & Nurmalisa, 2018)

Dalam mengimplementasikan UU ini banyak menemukan hambatan walaupun semua telah diatur di Undang-Undang. Hambatan tersebut harus segera dicari solusinya agar pemerataan terhadap akses pendidikan di negeri ini dapat dicapai. Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan akan pendidikan dengan tidak memandang kasta, ras, budaya, suku, dan agama. (Hakim, 2016)

Metode *Self Organizing Maps* untuk pemetaan pemerataan pendidikan di suatu daerah ini mempunyai tingkat ketepatan sebesar 81,25%. Lalu, tingkat ketepatannya sangat bergantung pada banyaknya data yang dilatih. Kualitas (mutu) tingkat keakuratannya diperoleh dari data yang digunakan sebagai data latih. (Syarli & Qashlim, 2017). Pendidikan toleransi, serta multikultural perlu diterapkan di lingkungan sekolah agar siswa tersebut dapat hidup dalam lingkungan sekolah yang heterogen. Pendidikan multikultural ini dilakukan guna mencapai upaya terdorongnya persamaan struktur sosial. (Suciartini, 2017)

Kepala Sekolah SMP Darul Karomah Mandarejo dalam menjalankan perannya menerapkan tipe kepemimpinan demokrasi. Kepala sekolah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan para murid, berbagai usaha yang telah dilakukan seperti menerapkan *fullday school*, mengadakan remidi, dll. Peran Kepala Sekolah disini yaitu sebagai administrator dan supervisor. (Ma'ruf, 2017)

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Kesimpulan/Temuan
1.	Dinar Wahyuni (2018)	Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019	Penerapan program zonasi ini menimbulkan banyak pro kontra dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem ini lebih mementingkan jarak daripada nilai.
2.	Muhammad Zainal Abidin dan Asrori (2018)	Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek	Pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode namun dalam implementasinya dapat juga diterapkan di dalam mata pelajaran yang ada. Biasanya dari sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui mata pelajaran agama islam yang di dalamnya juga mengandung materi karakter. Sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung, pendidikan karakter juga bisa di ajarkan.
3.	Elga Andina (2017)	Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik	Dampak psikososial bagi peserta didik maupun orang tua dari penerapan sistem zonasi ini yaitu biasanya PPDB dilihat dari nilai bukan dari jarak, sistem zonasi ini juga belum ada sosialisasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait. Sehingga dirasa peraturan baru ini harus dikaji ulang oleh pemerintah.
4.	I Made Candiasa dkk (2013)	Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Komunitas Guru Online.	Web guru ini mempunyai beberapa manfaat, dimana manfaat tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, misalnya saja menghilangkan kebiasaan plagiat di bidang karya ilmiah, karya ilmiah yang di buat oleh para guru juga menjadi dikenal oleh masyarakat luas berkat adanya web ini.

5.	Mujahidun (2016)	Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan.	Tidak sesuai atau sejalanannya tujuan pemerataan pendidikan dengan fakta yang ada dilapangan, sekolah dengan jargon unggulannya masing-masing bisa dengan mudah meminta biaya yang terkadang tidak sedikit. Hal ini sangat merugikan bagi para murid yang berasal dari kalangan tidak mampu.
6.	Ismail (2014)	Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Merata dan Berkualitas di Kota Makassar.	Pendidikan dasar 9 tahun harus mampu diterapkan bagi semua kalangan masyarakat. kewajiban ini juga harus segera dituntaskan sesuai dengan janji politik sebagaimana sudah dijelaskan Gubernur Sulawesi Selatan saat kampanye dulu. Kewajiban ini juga sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Di Kota Makassar sendiri penerapan pendidikan dasar 9 tahun ini sudah bagus. Namun, terkadang masih ada penyalahgunaan atau perlakuan dari sekolah bagi murid yang mampu dan bagaimana bagi para murid yang kurang mampu atau kurang beruntung.
7.	Hermin Aprilia Lestari (2018)	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017.	Implementasi kebijakan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam pembukaan PPDB menggunakan 2 tahapan yaitu <i>online</i> dan <i>offline</i> . Dari penerapan sistem zonasi ini banyak plus dan minus yang didapatkan oleh para siswa.
8.	Desi Wulandari, dkk (2017)	Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa.	Pengaruh PPDB melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung dapat dikatakan sudah baik, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya.
9.	Lukman Hakim (2016)	Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia haruslah merata tidak memandang fisik, ras, suku, budaya dan agama. Karena pendidikan ini dianggap sebagai HAM. Pemerataan pendidikan ini juga tertuang dalam Konstitusi Indonesia.
10.	Syarli dan Akhmad Qashlim (2017)	Pemetaan Pemerataan Pendidikan Menggunakan <i>Self</i>	Metode <i>Self Organizing Maps</i> untuk pemetaan pemerataan pendidikan di suatu daerah ini mempunyai tingkat ketepatan sebesar 81,25%. Lalu, tingkat ketepatannya sangat bergantung

		<i>Organizing Maps</i> (SOM) Terintegrasi Sistem Informasi Geografis.	pada banyak nya data yang dilatih. Kualitas (mutu) tingkat keakuratannya diperoleh dari data yang digunakan sebagai data latih.
11.	Ayu Suciartini (2017)	Urgensi Pendidikan Toleransi dalam Wajah Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan.	Pendidikan toleransi, erta multikultural perlu diterapkan di lingkungan sekolah agar siwa tersebut dapat hdiup dalam lingkungan sekolah yang heterogen. Pendidikan multikultural ini dilakukan guna mencapai upaya terdorongnya persamaan struktur sosial.
12.	M.Ma'ruf (2017)	Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Islam Darul Karomah Mandarejo Pasuruan	Kepala Sekolah SMP Darul Karomah Mandarejo dalam menjalankan perannya menerapkan tipe kepimipinan demokrasi. Kepala sekolah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan para murid, berbagai usaha yang telah dilakukan seperti menerapkan <i>fullday school</i> , mengadakan remidi, dll. Peran Kepala Sekolah disini yaitu sebagai administrator dan supervisor.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di atas yaitu sama-sama membahas mengenai sistem zonasi, pemerataan pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan baik secara umum maupun pembahasan secara khusus. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan berbagai penelitian yang sudah dilakukan di atas yaitu para peneliti seperti Dinar Wahyuni, Elga Andina, Mujahiddun, dan lain-lain mereka membahas lebih jauh bagaimana pro kontra dari masyarakat atau orang tua siswa, bagaimana dari penerapan sistem zonasi ini daat memberikan dampak psikososial bagi para murid, dan penelitian secara lebih mendalam lainnya. Penelitian ini sendiri akan membahas bagaimana pelaksanaan program atau sistem zonasi ini mampu untuk pemeratakan kualitas pendidikan di suatu wilayah.

1.6 Kerangka Teori

1. Kebijakan Zonasi Wilayah Pendidikan

Kebijakan atau lebih sering dikenal dengan kebijakan publik adalah keputusan untuk mengolah suatu masalah yang sudah ditemukan sebelumnya atau memenuhi permasalahan suatu kepentingan dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan sumber daya manusia dari sistem politik itu sendiri. (Wibawa, 2011) Kebijakan publik dikatakan berhubungan dengan bidang seperti kepentingan publik, ketertiban umum, utang publik, kesehatan publik dan juga sektor publik hal itu dikarenakan bidang-bidang tersebut di rancang sebagai bidang publik, tentunya berbeda ketika bidang-bidang itu dirancang untuk kepentingan pribadi “privat”. (Parsons, 2008) sedangkan kebijakan menurut Wilson yaitu tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal untuk mengambil) untuk menerapkan mereka, dan penjelasan mereka memberikan apa yang terjadi. (Kevin B. Smith, 2013)

Zonasi mungkin sekarang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Setahun belakangan Kemendikbud menerapkan peraturan baru bagi PPDB yaitu sistem zonasi (wilayah). Program zonasi ini diatur pada pasal 16 yang berbunyi zona wilayah pendidikan ini merupakan radius zona wilayah dari rumah yang ditinggali ataupun berdomisili calon peserta didik ke sekolah. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) zonasi merupakan pembagian suatu wilayah menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam peraturannya, Kemendikbud menyebutkan beberapa poin penting terkait PPDB dengan program atau sistem zonasi tersebut dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pasal diantaranya :

- a. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili atau tinggal di radius zona terdekat dengan prosentase 90% dari jumlah siswa keseluruhan yang akan diterima nantinya.
- b. Sedangkan untuk calon peserta didik baru yang berdomisili atau tinggal di luar radius zona sekolah memiliki prosentase masing-masing sebanyak 5% itupun dengan alasan terjadi bencana alam di tempat tinggal sebelumnya dan juga orang tua/wali tinggal di radius zona tersebut.
- c. Tempat tinggal calon peserta didik baru diterbitkan paling lama 6 bulan sebelum diadakannya PPDB.
- d. Apabila sekolah tersebut berada didaerah terpencil, perbatasan bahkan tertinggal hal tersebut dapat di musyawarahkan kembali antara pemerintah daerah A dengan pemerintah daerah B yang saling berbatasan tersebut bagaimana penentuan zona yang nantinya akan diterapkan.

Pendidikan adalah proses yang ada di setiap kehidupan manusia mulai dari ia lahir hingga ia meninggal, pendidikan akan terus berjalan mulai dari bangun tidur hingga ia tertidur kembali (Nugroho, 2008). Pendidikan adalah

pembelajaran yang terjadi seumur hidup dan berlangsung di semua lingkungan (Mudyaharjo, 2010). Pendidikan menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah proses untuk melatih perubahan pada sikap sebagai upaya pendewasaan melalui pengajaran formal maupun nonformal. (Harsono, 2011).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi pendidikan adalah aturan yang dibuat untuk mengatur zona atau jarak dalam pelaksanaan PPDB sebagai upaya untuk membuat perubahan ataupun proses mendewasakan seseorang. Aturan yang mewajibkan sekolah di setiap daerah untuk menerapkan sistem zonasi dan harus merujuk pada peraturan yang ada. Sehingga tidak ada lagi kasta yang tercipta antara sekolah satu dengan sekolah yang lain.

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerataan kualitas pendidikan adalah warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. (Syarli & Qashlim, 2017). Pemerataan pendidikan merupakan meratanya akses pendidikan bagi semua warga serta persamaan pendidikan semua warga baik yang mampu ataupun tidak mampu. Indikator yang digunakan untuk pemerataan pendidikan yaitu dapat dilihat dari berapa jumlah anak usia sekolah dengan jumlah sekolah, dapat dilihat juga dari jumlah guru, berapa jumlah siswa persekolah, berapa jumlah anak yang putus sekolah, serta berapa jumlah anak yang buta huruf di wilayah tersebut (Nugroho,

Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi, 2008). Sedangkan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga menyebutkan beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur pemerataan pendidikan sama dengan apa yang sudah disebutkan diatas, ketika indikator tadi sudah tercapai seluruhnya maka, bisa dikatakan pemerataan pendidikan itu telah berhasil dilaksanakan. (Nugroho, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi, 2008)

Kualitas menurut Edward Deming yaitu tingkatan yang dapat dilihat sejak awal dengan biaya rendah (Saputra, 2010). Kualitas atau mutu pendidikan harus terdapat 5 faktor yang mendominasi yaitu sebagai berikut: (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012)

1) Bagaimana kepala sekolah memimpin

Kepala sekolah harus mempunyai visi misi yang jelas, mampu bekerja secara optimal, giat dan harus memberikan layanan secara maksimal.

2) Guru

Guru diharapkan mengikuti kompetensi yang berupa seminar, diklat serta pelatihan sehingga nantinya dari hasil kegiatan tersebut dapat diterapkan disekolah masing-masing.

3) Siswa

Kemampuan atau kecerdasan dapat digali oleh sekolah, pendekatan yang digunakan untuk para siswa biasanya

menggunakan “anak sebagai pusat” sehingga sekolah dapat mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh siswa.

4) Kurikulum

Kurikulum yang mendukung, tidak berubah-ubah, terpadu dapat dengan mudah meningkatkan standar kualitas pendidikan sehingga diharapkan mencapai tujuan secara maksimal.

5) Jaringan Kerjasama

Diharapkan dari jaringan kerjasama ini tidak hanya dari masyarakat atau sekolah-sekolah saja, namun juga kerjasama dengan organisasi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah sehingga ketika siswa-siswa lulus dari sekolah terkait dapat langsung terserap di dunia kerja.

Selain itu ada pendapat lain menyebutkan bahwa kualitas pendidikan dapat dikelompokkan dalam sudut pandangan sistem yaitu dan kategori masukan (dampak dari masukan untuk proses belajar mengajar misalnya, kurikulum, fasilitas, dll.), kategori proses (apakah para murid nyaman selama pembelajaran berlangsung), kategori hasil (bagaimana hasil yang dirasakan oleh murid sebagai output dari pembelajaran selama beberapa waktu). (Triatna, 2015).

Jadi, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan adalah meratanya *output* (keluaran) yang dirasakan oleh para murid selama proses pembelajaran berlangsung. Hal

tersebut juga dilihat dari beberapa indikator yang sudah disebutkan di atas. Dengan begitu pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud dan anak-anak sebagai penerus bangsa juga dapat mengenyam pendidikan dengan layak.

3. Faktor-Faktor Keberhasilan Program Zonasi

Salah satu tokoh berpendapat bahwa kesuksesan program ini bisa ditunjang melalui pemerataan SDM atau calon peserta didik baru baik disekolah yang sudah dicap sebagai “sekolah favorit” ataupun belum sama sekali. Selain itu, program zonasi juga dituntut untuk memaksimalkan sarana prasarana disemua sekolah yang tersebar didaerah terutama sekolah terpencil.

Menurut Doni Koesoema A (A, 2018) yang disampaikan lewat tulisannya yang berjudul Tantangan Kebijakan Zonasi terdapat beberapa hambatan diantaranya bagaimana penerapan sistem zonasi ini yang harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini harus ditangani karena masih banyak sekali pemerintah daerah yang membuat persyaratan sendiri. Tantangan lain yaitu terjaminnya kualitas pendidikan yang merata di semua wilayah dalam konteks pelayanan pendidikan. Tantangan terakhir yaitu para murid yang tergolong miskin dapat mengakses layanan pendidikan ke sekolah yang paling dekat dari tempat tinggal.

Muhadjir Effendi (Kardi, 2018) selaku Menteri Pendidikan juga berpendapat bahwa masih ada hambatan yang harus dihadapi oleh

pemerintah untuk menerapkan program zonasi ini diantaranya kondisi masing-masing wilayah terutama bagi sekolah yang berada di daerah terpencil, jaringan internet juga jadi penghambat penerapan program atau sistem baru ini. Muhadjir Effendi juga berpendapat bahwa faktor utama yang digunakan untuk kesuksesan program zonasi adalah mengubah pola pikir orang tua siswa atau masyarakat untuk tidak stag pada nilai yang berfikir nantinya akan diterima di sekolah favorit.

Jadi, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program zonasi yaitu terdapat beberapa hambatan yang memang masih sangat sulit untuk diubah dengan cepat, baik oleh individu itu sendiri maupun pemerintah. Dari hambatan ini pemerintah berharap program zonasi dapat segera dilaksanakan dengan baik.

4. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel terkait antara lain:

1. Kebijakan Zonasi Wilayah Pendidikan

Kebijakan zonasi wilayah pendidikan adalah sebuah peraturan untuk menentukan radius terdekat dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) demi terwujudnya revolusi (perubahan) karakter anak bangsa.

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerataan Kualitas Pendidikan adalah meratanya akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat dengan mutu berupa input dan proses yang mendukung sehingga menghasilkan output yang diinginkan.

3. Faktor-Faktor Keberhasilan Program Zonasi

Faktor-faktor kesuksesan program zonasi adalah tolak ukur atau indikator bagi suatu permasalahan apakah nantinya berhasil atau gagal. Dalam faktor-faktor keberhasilan ini banyak menemukan hambatan yang menjadi faktor penghambat program zonasi.

1.7 Definisi Operasional

1. Kebijakan Zonasi Wilayah Pendidikan merujuk pada Teori Harsono (Harsono, Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif, 2011) yaitu:

- 1) SKPD yang mengatur program zonasi
- 2) SKPD yang menetapkan program zonasi
- 3) Sekolah yang menerapkan program zonasi

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan merujuk pada Teori Riant Nugroho (Nugroho, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi, 2008) yaitu sebagai berikut:

1. Cakupan Pemerataan Kualitas Pendidikan
2. Kesesuaian Program Zonasi dengan Tujuan Pemerataan

3. Faktor-faktor Keberhasilan Program Zonasi Pendidikan merujuk pada teori Dika Dania Kardi (Kardi, 2018) diantaranya:

1. Infrastruktur Zonasi

2. Partisipasi Masyarakat
3. SDM Pelaksana Zonasi

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) adalah metode yang biasanya bersifat positivisme dan biasanya sesuai apa yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai kunci utama dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menerangkan apa saja kejadian yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fakta yang terjadi pada saat itu dengan menjelaskan keadaan yang terjadi secara riil. Fakta bagaimana penetapan wilayah zonasi serta bagaimana indikator pemerataan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan. Kegiatan Pelaksanaan Program Zonasi Sekolah untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri untuk Jenjang SMA lebih mudah menggunakan metode ini karena metode tersebut dapat berkembang secara cepat dan luas terkait penelitian ini supaya masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait Pelaksanaan Program Zonasi Sekolah untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri untuk Jenjang SMA.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Wonogiri karena di beberapa Sekolah

Menengah di Wonogiri masih dianggap sebagai sekolah favorit dan belum meratanya siswa antara yang mendaftar disekolah satu dengan sekolah yang lain. Alasan lain mengapa peneliti tertarik mengambil lokasi di Kabupaten Wonogiri yaitu mengetahui bagaimana penetapan wilayah zonasi di Kabupaten Wonogiri.

3. Unit Analisis Data

Unit Analisis adalah suatu fokus agar penelitian bisa lebih spesifik. Unit analisis ini dapat berupa benda, individu ataupun kelompok. Analisa data sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil unit analisis data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA N 2 Wonogiri dan orang tua siswa.

Tabel 1.3
Unit Analisis Data

No	Unit Analisis Data	Objek
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Staff
2	SMA N 1 Wonogiri	Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan
		Guru
3	SMA N 2 Wonogiri	Ketua Panitia PPDB 2018
		Guru
4	Masyarakat	Orang Tua Siswa
5	Siswa	Siswa SMA Negeri 2 Wonogiri

4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendapatkan sebuah data mengenai pelaksanaan program zonasi sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peraturan dan Penetapan Wilayah Zonasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Wawancara
2.	Cakupan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesesuaian dengan Tujuan Pemerataan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Wawancara
3.	SDM Pelaksana Zonasi dan Infrastruktur Zonasi	Guru dan Staff	Wawancara
4.	Partisipasi Masyarakat	Orang tua siswa	Wawancara
5.	SDM Pelaksana	Siswa	Wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui dokumentasi dalam peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program zonasi sekolah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Pelaksanaan Program Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB
Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Zonasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cakupan Pemerataan Pendidikan	SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri
Output Zonasi selama Satu Semester	SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri
Juknis Pelaksanaan Program Zonasi Sekolah	Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Data Infrastruktur Zonasi	SMA N 1 Wonogiri dan SMA N 2 Wonogiri
Lampiran Zonasi PPDB 2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Daya Tampung SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

1. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik atau cara pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Wawancara ini juga menjadi sumber pengumpulan data paling utama. Wawancara dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada responden. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Tabel 1.6
Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Satuan
1.	Bapak Jasman Indradno	Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2.	Lies	Staff	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Drs. Warsino	Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan	SMA Negeri 1 Wonogiri
4.	David Ardiyanto, S.Pd., M.Pd	Guru	SMA Negeri 1 Wonogiri
5.	Tarmo	Ketua Pelaksana PPDB	SMA Negeri 2 Wonogiri
6.	Riyanto	Guru	SMA Negeri 2 Wonogiri
7.	Joko Waluyo	Wakasek Kesiswaan	SMA Negeri 2 Wonogiri
8.	Guntur Syaiful Hidayat	Masyarakat	-
9.	Anisa	Siswa	SMA Negeri 2 Wonogiri

2. Observasi

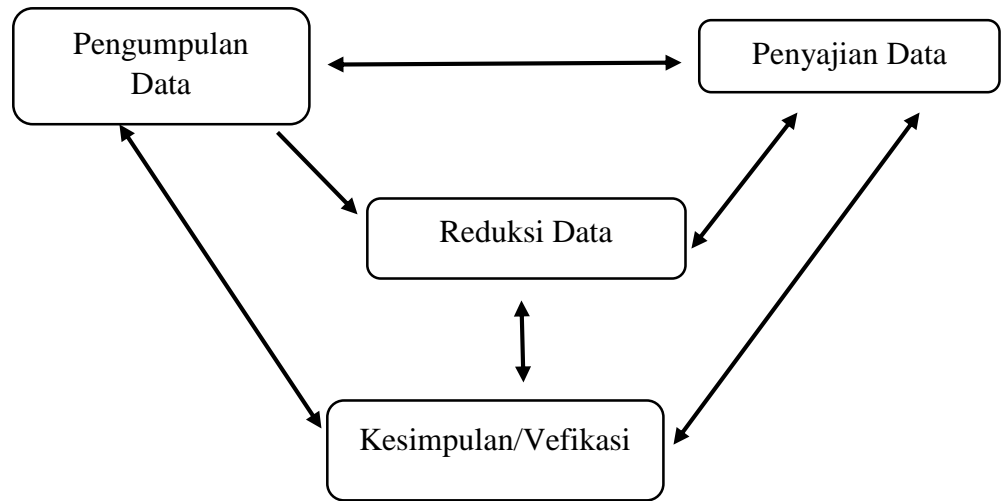
Observasi mengharuskan peneliti untuk terjun langsung langsung ke lapangan. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Di dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana metode guru dalam mengajar siswa yang heterogen (berbeda) di kedua sekolah tersebut untuk mencapai *goals* dari diterapkannya program zonasi tersebut.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan dalam proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi, lalu dari hasil tersebut di analisis kembali, dipahami, dijabarkan ke poin-poin tertentu dan dibuat kesimpulan untuk memudahkan pembaca ataupun diri sendiri untuk memahaminya. (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis primer karena hasil data yang nantinya akan digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait mengenai Analisis Pelaksanaan Program Zonasi Sekolah untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri untuk Jenjang SMA. Sedangkan untuk memperoleh data tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Teknik Analisis Data



Sumber: (Salim, 2006)

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dan memilah data yang dianggap penting terkait pelaksanaan sistem zonasi sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari data di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Pengumpulan data ini terkait dengan kebijakan atau peraturan zonasi, penetapan wilayah zonasi, cakupan pemerataan pendidikan, kesesuaian dengan tujuan pemerataan, infrastruktur, SDM, dan partisipasi masyarakat.

2. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti akan merangkum dan memilih poin-poin pentingnya. Reduksi data ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Namun pada tahap reduksi data ini juga dimulai saat peneliti sudah mulai mengerucutkan ke lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendidikan, SMA N 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri dan juga masyarakat. Dari hasil metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) di beberapa wilayah atau lokasi penelitian tadi kemudian disederhanakan lagi dan memilih poin-poin yang dirasa penting.

3. Penyajian data

Peneliti pada tahap ini akan menjabarkan informasi atau data yang sudah dikumpulkan untuk dipastikan apakah mungkin jika dilakukan penarikan kesimpulan bahkan melakukan tindakan lanjutan. Penyajian data pada penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan teks naratif. Penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya juga berbentuk grafik, tabel, bagan, serta korelasi antar hubungan per kategori. Setelah mendapatkan poin-poin di tahapan reduksi data, selanjutnya peneliti akan membuat sajian data yang mendeskripsikan temuan mengenai bagaimana pelaksanaan program zonasi untuk pemerataan pendidikan di Kabupaten Wonogiri untuk jenjang SMA. Sajian data ini bersumber dari informasi yang

telah di dapatkan dengan metode tadi, dan informasi ini tentunya sudah dipilah dan di kerucutkan berdasarkan penting atau tidak nya informasi tersebut.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Terakhir, peneliti akan menetapkan kesimpulan dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan pada tahap awal ini mungkin bisa kapan saja berubah, hal tersebut bisa terjadi apabila peneliti menemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data. Apabila peneliti pada saat mengumpulkan data dan ditemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya. Dari hasil deskripsi terkait pelaksanaan program zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan untuk jenjang SMA pada tahap penyajian data, selanjutnya dilakukanlah penarikan kesimpulan sementara, dari penarikan kesimpulan sementara tersebut akan terus berkembang karena kemungkinan mendapatkan data dan temuan tambahan mengenai pelaksanaan program zonasi ini sangat besar. Apabila data dan temuan mengenai pelaksanaan program zonasi ini dirasa sudah benar-benar valid dan sempurna maka akan ditarik kesimpulan akhir.